

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah

1. Pengertian Peran

Peristilahan Peran pada KKBI memiliki pengertian pemain sandiwara, tukang lawak di permainan makyong, tingkah yang harapannya dipunyai dari orang yang berkedudukan di masyarakat.⁷ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), jika seseorang melakukan hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukan, jadi dia telah melakukan suatu fungsi. Peran adalah aspek dinasi dari status yang dimiliki dari seseorang, lalu status bisa diartika sebagai kumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang yang telah melakukan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukan, makai ia telah melakukan suatu fungsi. Pada hakekatnya peran adalah suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan. Bagaimana peran itu akan dijalankan juga dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Pada dasarnya, dalam memainkan peran tidak ada perbedaan baik peran yang

⁷Departemen Pendidikan, *KBBHI (Kamus Besar Bahasa Indoneswia) Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 35.

dimainkan pimpinan teratas, menengah atau bawah. Semua akan memiliki peran yang sama atau setara. Peran adalah tingkah laku yang dilaksanakan oleh orang yang menduduki sebuah tempat di strata sosial, syarat peran tercakup 3 (tiga) hal, sebagai berikut:

1. Peran melingkupi norma dimana berhubungan atas kedudukan seseorang di masyarakat. Peranan dapat berarti serangkaian aturan yang bertujuan membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran juga bisa berarti sebagai tingkah laku pribadi yang utama bagi struktur sosial masyarakat. Peran yaitu suatu rangkaian yang teratur dan bisa ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk hidup berkelompok. Di kehidupan berkelompok, akan terjadi interaksi antar anggota masyarakat yang berada didalamnya. Interaksi yang tumbuh diantara anggota masyarakat akan menimbulkan rasa saling ketergantungan, sehingga di kehidupan bermasyarakat akan muncul apa yang disebut dengan peran (role).
3. Peran adalah aspek dinamis yang berasal posisi seseorang, jika seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Agar memberikan pemahaman yang lebih jelas, terlebih dahulu kita bisa memahami tentang pengertian peran.⁸

⁸Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amelia 2002), hal. 120

Menurut Poerwadarminta peran bisa berarti tingkah laku yang dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok dalam keadaan dan situasi tertentu, yang mana perilakunya akan menjadi sebuah upaya yang diinginkan oleh individu atau kelompok yang mempunyai posisi atau jabatan tertentu pada susunan masyarakat. Sehingga, apabila upaya tersebut diinginkan masyarakat maka pribadi atau kelompok yang memiliki kedudukan dan tugas dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Penulis mengemukakan kesimpulan bahwa peran adalah tingkah laku terharapkan atas banyak individu ataupun kelompok individu kepada seseorang dimana mempunyai status ataupun kedudukan tertentu. Peran tidaklah berarti sebagai hak dan kewajiban individu, tapi bisa juga tugas dan kuasa atau kewenangan organisasi yang bersangkutan.

2. Pemerintah Daerah

Menurut Suhady dalam Riawan, pemerintah memiliki arti organisasi atau lembaga resmi yang menjalankan pemerintahan negara, negara bagian, kota atau daerah lainnya. Dari sifatnya, pemerintah dalam artian lebih luas merupakan serangkaian wewenang meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan dalam artian lebih sempit, pemerintah mempunyai wewenang kekuasaan eksekutif saja.

UU No 23 Tahun 2014 terkait Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah yaitu keterseleenggaraan kepentingan

pemerintah dari pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi serta tugas pembantuan atas prinsip otonomi seluas-luasnya pada sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang termaksudkan pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud atas Pemerintah Daerah yaitu gubernur, bupati ataupun walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Berdasarkan teori, keberadaan pemerintah daerah dapat dilihat dari banyak sudut pandang keilmuan. Pada ilmu ekonomi, keberadaan pemerintah daerah menunjukkan adanya usaha untuk meningkatkan kesejahteraan individu dengan cara pemberian kesempatan memilih secara umum akibat bertambahnya permintaan dan penawaran. Pada ilmu politik, keberadaan pemerintah daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan. Pada ilmu administrasi, keberadaan pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja berdasarkan lokasi untuk menyerap kebutuhan yang beragam disetiap lokasi.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa demi terselenggaranya pemerintah yang efektif dan efisien bisa diwujudkan dalam bentuk penguatan pemerintah daerah dengan harapan mendorong partisipasi masyarakat agar lebih besar yang dipimpin oleh kepala daerah. Pemerintah daerah bisa berarti sebagai lembaga yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh badan-badan terpilih.

Pemerintah daerah dalam sudut pandang penelitian ini adalah badan resmi yang bertanggung jawab penuh dalam menyelenggarakan proses pengembangan sektor Usaha Mikro Menengah di Kabupaten Trenggalek. Lembaga ini adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan yang berperan jadi tokoh penting pada proses berkembangnya usaha kecil atau mikro dan menengah di Kabupaten Trenggalek.⁹

Menurut Nurcholis dkk, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki 3 fungsi utama yaitu:

- a. Mewujudkan pelayanan perseorang maupun publik dengan biaya murah, ringkas, cepat, baik serta adil.
- b. Melaksanakan pembangunan fasilitas ekonomi yang berfungsi untuk sarana pertumbuhan ekonomi dengan upaya membangun semua sektor yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kemudahan aktivitas ekonomi.
- c. Mewujudkan pelayanan perlindungan kepada masyarakat, dengan harapan terciptanya ketertiban, rasa tentram dan rasa aman pada masyarakat.

⁹Hamami Cahya Prastika, *Peran Pemerintah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan*, (Surabaya: Skripsi Diterbitkan, 2017), hal. 23

3. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah mempunyai peranan penting khususnya dalam mengoptimalkan sumber daya ekonomi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Sebagai penyelenggara pemerintah, instansi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dituntut guna bisa memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan segala potensi yang ada di daerah termasuk usaha mikro menengah. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah maupun perekonomian masyarakat.

Menurut Blakely, menjelaskan bahwa peran pemerintah di pembangunan ekonomi daerah mencakup hal sebagai berikut, yaitu:

1. Peran sebagai wirausaha

Pemerintah daerah berperan sebagai wirausaha yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan suatu usaha. Pemerintah daerah diharapkan untuk teliti dan pro-aktif dalam mengembangkan bisnis daerah termasuk pemanfaatan aset pemerintah daerah, mendorong bisnis daerah bertumbuh dan memberdayakan masyarakat marginal.

2. Peran sebagai koordinator

Pemerintah daerah akan mengesahkan regulasi atau menyarankan strategi pembangunan di daerahnya yang dipimpinnya sebagai wujud dari perannya sebagai koordinator.

3. Peran sebagai fasilitator

Sebagai fasilitator, pemerintah daerah melakukan pengefisiensi proses pembangunan, memperbaiki proses atau tata cara perencanaan dan penetapan aturan. Saat berjalannya pembangunan perlu difokuskan tujuannya agar sumber daya dan tenaga dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan memberikan pondasi untuk menentukan program tambahan untuk proses kedepan.

4. Peran sebagai stimulator

Sebagai stimulator, pemerintah daerah bisa melaksanakan tindakan istimewa atau khusus yang bertujuan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk bergabung ke daerah tersebut dan menjaga supaya perusahaan-perusahaan tetap berada di daerah tersebut.

Menurut Saedah, menjelaskan bahwa peran pemerintah di pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) meliputi:

1. Pengembangan produksi meliputi bimbingan pengembangan mutu, bimbingan pengembangan manajemen, pengujian mutu dan hak kekayaan intelektual dan layanan teknologi.
2. Pengembangan pemasaran adalah layanan informasi, pengenalan dan fasilitas pertunjukan produk.
3. Fasilitas finansial dengan memberikan pinjaman atau modal yang mendukung.
4. Pengembangan sumber daya industri dengan cara pelatihan.

5. Pengembangan teknologi melalui cara menguatkan organisasi pembina/pendukung teknologi (unit pelayanan teknis) di daerah.

Salah satunya usaha guna peningkatan ekonomi masyarakat yaitu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat agar potensi yang dimiliki terus berjalan dan berkembang. Melalui pemberdayaan yang diberikan kepada sektor usaha kecil menengah meliputi pengembangan produksi, pengembangan pemasaran, fasilitas keuangan, pengembangan sumber daya dan pengembangan teknologi diharapkan mampu meningkatkan sektor ekonomi pada industri masyarakat.¹⁰

Sementara itu, Diva mengemukakan pendapatnya terkait peran efektif pemerintah dalam pengembangan UMKM yaitu:

1. Peran pemerintah sebagai fasilitator

Aneka fasilitas penunjang wajib disediakan oleh pemerintah untuk UMKM agar menggapai tujuannya. Fasilitas yang bisa diadakan meliputi pemberian bantuan, pelatihan, atau subsidi barang maupun jasa sesuai dengan regulasi yang disahkan oleh pemerintahan itu sendiri.

2. Peran pemerintah sebagai regulator

Secara singkat arti pemerintah atas regulator adalah wewenang untuk menyusun regulasi-regulasi untuk memudahkan proses pengembangan UMKM. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah mempunyai tugas untuk menjaga keadaan dan situasi lingkungan

¹⁰Gresela Youniga, *Peran Pemerintah daerah Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Batik Kabupaten Malang*, (Malang: Skripsi Diterbitkan, 2017), hal. 23

usaha agar tetap tenang untuk melakukan kebijakan yang telah ditetapkan. Sebagai pembuat kebijakan, pembagian kewenangan terbagi atas dua yaitu, kuasa pemerintah pusat dan kuasa pemerintah daerah. Keduanya mempunyai tugas dan kuasa sendiri-sendiri guna pengaturan warga masyarakat dimana berada pada lingkup wilayah masing-masing.

3. Pemerintah sebagai katalisator

Menurut KKBI, katalisator berarti suatu hal yang mengakibatkan timbulnya kejadian baru dan perubahan ataupun mempercepat proses sebuah kejadian. Sebagai upaya memenuhi perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berfungsi sebagai pihak pemantik proses percepatan berkembangnya UMKM. Terlibatnya pemerintah untuk katalisator bisa dengan menyeluruh, namun hanya sebagai faktor mempercepat saja. Pemerintah juga bisa melaksanakan tindakan seperti memberikan *award* sebagai wujud apresiasi terhadap UMKM, memberdayakan komunitas kreatif untuk produktif, dan permodalan bagi UMKM.¹¹

B. Kerajinan Batik

1. Pengertian Batik

Salah satu wujud kebudayaan bangsa Indonesia adalah batik. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menobatkan batik sebagai warisan budaya dunia yang dimiliki oleh Indonesia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2

¹¹Gede Diva, *Mengembangkan UKM Melalui Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Jakarta*, (Jakarta: Bakrie School of Management), hal. 15

Oktober menjadi peringatan Hari Batik di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa batik merupakan sebagian kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan malam (lilin) pada kain, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Batik merupakan karya seni rupa yang diimplementasikan pada kain dilengkapi lilin batik sebagai penghalang warna, menurut Konsensus Nasional tanggal 12 Maret 1996. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa batik merupakan kain polos yang bisa dibuat motif-motif tertentu menggunakan malam pada kainnya dan motifnya mengandung nilai-nilai sejarah. Batik mampu menarik hati masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar negeri, karena memiliki corak dan motif yang istimewa. Kain batik sudah menjadi keseharian masyarakat Indonesia.¹² Batik dapat digolongkan menjadi 5 yaitu:

a. Batik Tulis

Batik Tulis didefinisikan sebagai batik yang dibuat dengan alat canting tulis untuk membantu menempelkan lilin batik pada kain.

b. Batik Cap

Batik cap yaitu batik yang aktivitas pembuatan dibantu canting cap yang berfungsi melekatkan lilin di kain batik dan memberikan motif.

¹²*Ibid*, hal. 58-59

c. Batik Kombinasi

Batik kombinasi diartikan sebagai batik dengan proses pembuatannya dengan canting tulis dan canting cap untuk memberikan motif dan pelekatan lilin batik didalam kain.

a. Batik Modern

Batik modern atau dikenal sebagai batik lukis adalah batik yang proses melekatkan lilin di kain baik tidaklah memanfaatkan canting tulis ataupun canting cap, melainkan kuas ataupun alat lainnya sesuai kebutuhan.

b. Batik Prada atau Bordir

Batik border atau prada adalah kumpulan dari batik tulis, cap, maupun kombinasi yang motifnya (gambarnya) Sebagian akan diberi warna-warni tertentu sesuai selera menggunakan metode bordir atau dihiasi warna perah atau emas dengan kuas.

Terdapat 6 hal yang ada pada batik antara lain : 1) Canting cap, 2) Canting Tulis, 3) Zat Pewarna, 4) Desan Motif, 5) Malam/lilin batik, 6) Kain/media. Sehingga dapat diambil kesimpulan kerajinan batik adalah karya seni dengan media kain berbagai macam corak motif dilengkapi olesan indah dari canting yang berisi lilin batik (malam), kemudian dicelup pada zat warna¹³.

¹³Indah Dewi Apriliana, *Strategi Pengembangan UMKM Batik Untuk Meningkatkan Daya Saing Batik Semarang Di Kampung Batik Kota Semarang*, (Semarang: Skripsi Diterbitkan 2019), hal. 42-43

2. Sejarah Batik

Sejarah batik Indonesia panjang dan cukup menarik. Menurut Wulandari menyatakan bahwa:

“Batik semakin dikenal pada zaman Kerajaan Majapahit yang wilayahnya luas. tapi, informasi yang lebih jelas terkait sejarah dan berkembangnya batik Indonesia dimulai dicatat jelas mulai masa Kerajaan Mataram Islam yang sumbernya dari keraton, seperti parang rusak, semen rama dan sebagainya.”

Dulu batik hanya dimanfaatkan untuk hiasan didalam daun lontar saja agar tulisan bisa lebih menarik. Akan tetapi, seiring zaman berkembang, batik makin terkenal dengan munculnya media kain mori yang sebagai pengganti daun lontar. Batik digunakan di kerajaan sebagai pakaian penguasa kerajaan atau busana tradisional setelah menggunakan media kain. Wulandari menyatakan bahwa:

“Sejarah pembatikan di Indonesia tercatat seringkali terkaitkan atas Kerajaan Majapahit dan proses sebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Pendapat tersebut terbukti atas penemuan arca pada Candi Ngrimbi sekitar Jombang dengan penggambaran sosok Raden Wijaya, raja pertama Majapahit yang memerintah pada tahun 1294-1309, memakai kain batik motif kawung.”

Sekarang ini batik semakin populer di semua kalangan masyarakat. Kegunaan batik tidak hanya untuk busana tetapi bisa dijadikan barang fungsional seperti asesoris, hiasan rumah, dompet, tas, mukena, taplak dan lain-lain.

Atas pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa batik mulai dikenal pada zaman Kerajaan Majapahit. Awalnya batik hanya sebagai penghias daun lontar. Namun seiring perkembangan zaman batik semakin maju dan berkembang yaitu berupa kain yang dapat dijadikan

beberapa produk yang digemari oleh masyarakat. Melalui proses yang cukup panjang, awalnya hanya kain polos berubah menjadi kain yang memiliki corak motif yang beragam karena kreatifitas dan inovasi para pelaku usaha dan pengrajin batik.¹⁴

3. Perkembangan Batik di Indonesia

Sekarang batik terjadinya perkembangan begitu pesat. Kemajuan tersebut dapat dipantau dari para pengusaha Indonesia yang tertarik pada usaha batik karena semakin ragamnya corak batik Indonesia, sehingga batik menjadi lebih banyak diminati oleh masyarakat. Sebagaimana pendapat Wulandari sebagai berikut:

“Ragam hias yang beraneka ragam turut menambah variasi corak kain batik yang sudah lama terdapat di Indonesia. Industri batik Indonesia muncul sejak munculnya tradisi membatik di Nusantara. Proses yang panjang membuat industri batik Indonesia tetap dikenal sampai saat ini. Ditambah setelah mendapatkan pengakuan dari PBB yang mana batik menjadi warisan budaya Indonesia, semakin bersemangatlah masyarakat untuk terus melestarikan dan membudidayakan batik.”

Perkembangan batik telah berhasil menarik selera masyarakat untuk memakai batik. Bahkan batik Indonesia telah mencapai luar negeri melalui ekspor. Anggapan masyarakat luar negeri bahwa batik Indonesia mempunyai kualitas juara sehingga permintaan batik untuk ekspor terus meningkat. Kelebihan yang dimiliki batik Indonesia dengan batik negara lain adalah keragaman motif yang memiliki cerita sejarah dan desain pengerjaannya yang cenderung halus. Terlepas dari

¹⁴Gresela Youniga, *Peran Pemerintah daerah Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Batik Kabupaten Malang,*, hal. 60

prestasi yang telah dicapai, industri batik Indonesia juga mengalami berbagai tantangan antara lain: keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya teknologi, terbatasnya persediaan bahan baku, pemasaran yang rendah.¹⁵

C. Pasar Nasional

1. Pengertian Pasar Nasional

Dalam bahasa latin, pasar berasal dari kata “*mercatus*” yang artinya berdagang atau tempat berdagang. Sedangkan dalam bahasa arab dari kata “*bazar*” yang bisa diartikan sebagai tata letak ekonomi dan cara hidup, merupakan hal yang biasa ditemui dari kegiatan ekonomi untuk mencapai segala aspek kehidupan masyarakat dan dunia sosial budaya lengkap dengan sendirinya.¹⁶ Bisa disimpulkan bahwa pasar yaitu tempat pertemuan penjual dan pembeli guna melaksanakan transaksi jual beli barang atau jasa dimana terdapat kekuatan permintaan dan penawaran saling bertemu dan membentuk suatu harga. Peraturan Presiden No 112 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pasar yaitu tempat jual beli barang dengan kuantitas penjual lebih dari satu baik yang disebutkan sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, *plaza*, pusat perdagangan atau sebutan lain.

Interaksi di pasar akan bisa berjalan jika terpenuhinya syarat yaitu, yaitu: (1) didapati penjual serta pembeli, (2) terdapat barang dan jasa dimana diperjual belikan, (3) terdapat interaksi antara penjual serta

¹⁵*Ibid.*, hal. 61-62

¹⁶Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pasar*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 9

pembeli (interaksi jual beli), (4) terdapat media atau tempat atau interaksi antara penjual dan pembeli.

Menurut Muh Abdullah, pembagian pasar dilihat dari keleluasaan distribusi atau luas jangkauannya dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Pasar lokal adalah pasar dimana menjual dan membeli produk pada satu kota tempat produk itu diproduksi.
- b. Pasar daerah adalah pasar dimana menjual dan membeli produk pada satu area produk itu diproduksi.
- c. Pasar nasional adalah pasar dimana menjual dan membeli produk dalam satu negara tempat produk itu dihasilkan.
- d. Pasar internasional adalah pasar yang menjual dan membeli produk dari beberapa negara.¹⁷

Jadi, bisa tersimpulkan bahwa pasar nasional merupakan salah satu jenis pasar atas aspek luasnya jangkauan pemasaran suatu produk. Pasar nasional yaitu pasar tempat membeli dan menjual produk pada satu negara tempat produk itu diproduksi. Pemasaran produk dalam negeri bertujuan untuk menambah pendapatan penduduk tiap tahunnya. Jadi pasar nasional melayani permintaan dan penjualan dari dalam negeri dan untuk pemasaran hasil produksi mencakup pasar dalam negeri.¹⁸

¹⁷Muh. Abdul Halim, *Teori Ekonomi Mikro Edisi 3*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hal. 84

¹⁸Wahab, *Ensiklopedia Perdagangan Nasional*, (Semarang: Aprin, 2010), hal. 19

2. Fungsi Pasar

a. Fungsi Distribusi

Peranan pasar sebagai penyalur barang dan jasa atas produsen kepada konsumen dengan transaksi jual beli.

b. Fungsi Pembentukan Harga

Penjual dan pembeli melaksanakan tawar menawar harga hingga kedua belah pihak sepakat dan terjadilah transaksi.

c. Fungsi Promosi

Pasar dimanfaatkan guna mengenalkan produk baru dari produsen pada calon konsumen supaya calon konsumen tertarik dengan produk baru yang ditawarkan.¹⁹

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk bahan perbandingan sekaligus sebagai acuan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan peran Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan daya saing kerajinan batik. Berikut ini penelitian terdahulu sebagai landasan meliputi:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku	Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku	Kualitatif	Peran pemerintah yang dilakukan: 1) sebagai fasilitator melalui bermacam	Dalam penelitian sebelumnya, pengembangan UMKM

¹⁹Mila Saraswati dan Ida Widaningsih, *Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi, VIII SMP/MTS)*, (Jakarta Timur: Grafindo Media Pratama, 2008), hal. 87

	Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik- Manik Kaca di Kabupaten Jombang (Tanggara Gani Putra 2015) ²⁰	Usaha	<p>aktivitas fasilitasi dimana mencakup pelatihan manajemen usaha dan proses produksi, bantuan sarana dan prasarana seperti diberikan perlengkapan penumbuk kaca dan tungku pembakaran.</p> <p>2) sebagai katalisator melalui bermacam aktivitas mencakup penetapan manik-manik kaca, promosi produk skala nasional dan internasional, bantuan pengurusan HAKI, penyedia modal bergulir atas bunga terendah.</p> <p>Sedang partisipasi masyarakat berupa:</p> <p>1) hadirnya para pengrajin pada tiap aktivitas diskusi dimana</p>	<p>didukung oleh peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan hanya didukung oleh peran pemerintah kabupaten melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.</p>
--	--	-------	--	--

²⁰Taranggana Gani Putra, "Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang", *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol 3, No 1, Januari-April 2015

				diadakan Dinas Koperasi &UMKM 2)memberikan ide gagasan untuk pengembangan UMKM	
2	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Budaya Lokal (Studi tentang Progam Pemberdayaan Pengrajin Batik Dalam Rangka Meningkatkan Komoditi Ekonomi di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan-Madura) (Roro Merry C.W, Yuli Andy Gani,	Peranan Pemerintah Daerah	Kualitatif	Pemerintah Daerah melakukan perannya sebagai berikut: 1)Memberikan permodalan dengan pinjaman Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 2)Mengadakan latihan membuat dan manajemen pemasaran 3)Pemunculan nuasa batik pada tiap agenda acara 4)Mengikuti pada bermacam agenda 5)Membuat paguyupan pengrajin batik 6)Pembuatan sentra batik 7)Mencarikan popularitas batik Pamekasan Peranan masyarakat antara lain: 1)Pemenuhan alat	Dalam penelitian sebelumnya peran pemerintah daerah lebih mengarah pada keinginan pemerintah untuk meningkatkan barang yang bernilai ekonomi yang bisa diperdagangkan melalui batik tersebut. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan untuk menjelaskan peran pemerintah daerah dalam peningkatan kerajinan batik di pasar nasional

	Hermawan, 2015) 21			dan bahan, proses pembuatan batik, proses mempertahankan motif batik, hingga proses pemasarannya. Peran Disperindag antara lain: 1)Melakukan pelatihan kepada pengrajin batik 2)Mengadakan event pasar kemerdekaan untuk tempat yang efektif untuk pemasaran. 3)inovasi dan kreasi terhadap motif-motof batik	
3	Kinerja Kebijakan Tentang Pengembangan Usaha di Kabupaten Sidoarjo (Endang Indartuti dan Achmad	Kinerja kebijakan	Kualitatif	kebijakan yang dilakukan pemerintah kabupaten Sidoarjo dalam pengembangan usaha batik yaitu mengadakan pembinaan, pedampingan dan pengelolaan	Dalam penelitian sebelumnya, kebijakan pemerintah selain pengembangan usaha sekalian untuk pembangunan desa Ngaresrejo Kecamatan

²¹Roro Merry C. W., et. all., "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Budaya Lokal (Studi tentang Progam Pemberdayaan Pengrajin Batik Dalam Rangka Meningkatkan Komoditi Ekonomi di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan-Madura)", *Jurnal Wacana* ,Vol 18, No 3, 2015

	Syafi'i, 2015) ²²			pengrajin batik di Desa Ngaresrejo, Kecamatan Sukodono melalui pelatihan, pembukuan dan keterampilan menggunakan alat. Pemerintah melakukan koordinasi dengan mitra pengrajin terkait kegiatan. Pemerintah juga mencarikan peluang pasar pada UKM untuk dicover dalam Website Untag Surabaya. Sehingga masyarakat kabupaten Sidoarjo bisa kompetitif dalam meningkatkan kualitas produk batik di tatanan pasar Internasional	Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan, peran pemerintah kabupaten hanya untuk meningkatkan kerajinan batik terang galih dipasar tingkat nasional.
4	Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian	Peran Pemerintah Dan Masyarakat	Kualitatif	1)Pemerintah daerah mengadakan pelatihan membatik, mengadakan event-event	Dalam penelitian sebelumnya lebih menekankan pada bagaimana peran pemerintah

²²Endang Indartuti dan Achmad Syafi'i, "Kinerja Kebijakan Tentang Pengembangan Usaha Batik Di Di Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Pengabdian LPPM Untag Surabaya*, Vol 1, No 1, November 2015

	<p>Budaya Batik Banyuwangi (Ikhwanul Qiram, Gatut Rubiono, 2016)²³</p>		<p>lomba untuk menambah kreatifitas motif batik, melakukan pengelolaan merek dagang (branding), pengemasan dan desain produknya serta membantu mempromosikan batik di lingkup lokal, nasional dan internasional. 2)Peran masyarakat terletak pada antusias mereka mengikuti setiap event lomba maupun festival untuk menampilkan batik Banyuwangi, semangat mereka menjadi penonton, kebanggaan mereka atas identitas diri mengakibatkan kecintaan produk batik lokal, yaitu dengan memakai batik sebagai seragam dinas dilingkungan PNS dan seragam</p>	<p>daerah dan masyarakat untuk melestarikan batik. Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan untuk menjelaskan peran pemerintah daerah dalam peningkatan kerajinan batik di pasar nasional.</p>
--	---	--	--	--

²³Ikhwanul Qiram dan Gatut Rubiono, *Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Budaya Batik Banyuwangi*, (Banyuwangi: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2016)

				sekolah, digunakan saat acara formal maupun non formal. Bahkan dikalangan etnis asli Banyuwangi, batik dianggap sebagai pusaka warisan leluhur yang harus dihormati, terjaga, dan terawat.	
5	Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan (Hamami Cahya Prastika, 2017) ²⁴	Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Kualitatif	1)Peranan Pemerintah untuk fasilitator pada penyediaan alat seperti mesin jahit, penyedia wadah pendampingan tim digitale-IKM beserta pemberian pelatihan. 2)Partisipasi pelaku UMKM yaitu dalam pemanfaatan hasil sebab pelaku UMKM memanfaatkan mesin pemberian atas pemerintah dan mengikuti program pelatihan sehingga meningkatkan	Dalam penelitian sebelumnya selain peran pemerintah juga terdapat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kerajinan kulit. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan hanya menjelaskan peran pemerintah daerah saja dalam peningkatan kerajinan batik di pasar nasional

²⁴Hanami Cahya Prastika, *Peran Pemerintah daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit Di Kabupaten Magetan*, (Surabaya: Skripsi Diterbitkan, 2017)

				kualitas produksi menjadi produk unggulan Kabupaten Magetan.	
6	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Industri Kecil Batik (Gresela Youniga, 2017)	Peran Pemerintah Daerah	Kualitatif	<p>1)Pemerintah Daerah melakukan pembelajaran, meningkatkan teknologi proses seperti hibah bantuan alat, tapi tidak diikuti langsung dengan petunjuk pemakaian alat tersebut serta pemasaran meliputi pameran tingkat daerah maupun nasional.</p> <p>2)Faktor pendukung yaitu sokongan pemerintah daerah dan perkumpulan batik sebagai aspirasi pengrajin batik.</p> <p>3)Hambatan yang dihadapi yaitu sulitnya memperoleh bahan baku sehingga harus mencari diluar daerah Malang dan sedikitnya</p>	<p>Dalam penelitian sebelumnya, pemerintah daerah tidak hanya melakukan perannya tetapi juga menentukan strategi untuk pemberdayaan industri batik demi mencapai keberhasilan mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan menjelaskan peran pemerintah daerah dalam peningkatan kerajinan batik di pasar nasional</p>

				tenaga kerja karena masyarakat Malang yang tidak biasa untuk membuat	
7	Upaya Pemerintah Dalam Peningkatan Industri Batik Bakaran di Kabupaten Pati Melalui Progam Ekonomi Kreatif (Usisa Rohmah, Ardli Johan Kusuma, Fachry Rohilie, 2017) ²⁵	Upaya Pemerintah	Kualitatif	1)Disperindag melakukan pelatihan kilat guna peningkatan mutu batik bakaran supaya menarik konsumen 2)terdapat aturan pemakaian batik bakaran sebagai seragam PNS Kab. Pati sehingga produksinya meningkat dan bisa menarik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri supaya berkunjung ke Kab. Pati 3)Disperindag melakukan promosi dari mulut ke mulut antar konsumen hingga permintaan masyarakat meningkat	Dalam penelitian sebelumnya, teknik pengumpulan data memanfaatkan librarian research dan interview. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan akan memanfaatkan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

²⁵Usisa Rohmah, et. all., “Upaya Pemerintahan Dalam Peningkatan Industri Batik Bakaran Di Kabupaten Pati Melalui Progam Ekonomi Kreatif”, *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol 2, No 2, Oktober 2017

				<p>4) pemasaran melalui online agar lebih efektif dan efisien</p> <p>5) Pemerintah memberikan arahan bahwa batik bakaran harus masuk dalam program ekonomi kreatif supaya dapat berdaya saing di pasar nasional</p>	
8	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Nilam Di Kecamatan WatuBangga Kabupaten Kolaka	Peran Pemerintah Daerah	Kualitatif	<p>1) Tanahnya cocok untuk budidaya nilam, pengendalian hama dilakukan secara preventif.</p> <p>2) Peran Pemerintah sebagai regulator, sebagai fasilitator, dan sebagai katalisator.</p> <p>3) Belum ada dampak pemberdayaan nilam karena belum pernah ada pelatihan dari Pemerintah,</p>	<p>Dalam penelitian ini peran pemerintah secara regulator, fasilitator dan katalisator dalam pemberdayaan nilam. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya teliti lebih fokus pada peran pemerintah dalam meningkatkan pemasaran batik di pasar nasional.</p>
9	Strategi Dinas Koperasi,	Strategi Dinas Koperasi,	Kualitatif	1) Strategi yang dilaksanakan dinas pada	Dalam penelitian sebelumnya,

	Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Usaha Tempe Kripik Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek (Narastry Abiyoga, 2019) ²⁶	Usaha Mikro dan Perdagangan		pemberdayaan usaha tempe kripik di kelurahan Tamanan antara lain dengan memberikan pelatihan baik bagi pelaku usaha yang baru maupun yang lama, fasilitasi permodalan, melakukan promosi dan perluasan pasar. 2) faktor pendukung untuk memberdayakan usaha tempe kripik dari dalam yaitu antusias pengusaha untuk ikut dalam pelatihan, ada dan berfungsinya galeri untuk media pemasaran dan promosi produk, diselenggarakan bazar tiap tahun. Dari faktor luar yaitu tempe kripik menjadikan ciri khas Kelurahan	membahas tentang strategi atau cara yang di lakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan untuk pemberdayaan usaha tempe kripik. Sedang dalam penelitian yang akan saya laksanakan lebih fokus didalam peran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang dalam meningkatkan setiap usaha yang ada di Trenggalek termasuk usaha batik.
--	--	-----------------------------	--	---	--

²⁶Narastry Abiyoga, *Strategi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Usaha Tempe Kripik Di Kelurahan Tamanan Kecamatan Trenggalek*, (Tulungagung: Skripsi Diterbitkan, 2019)

				<p>Tamanan dan berkurangnya pengangguran. Sedangkan faktor hambatan secara internal yang di hadapi Dinas yaitu tidak terdapat tenaga konsultan, terbatasnya tersedianya teknologi, minimnya anggaran dana untuk menggelar pelatihan, terbatasnya modal untuk pengembangan usaha. Secara eksternal tidak terdapat tempat membuang limbah dan adanya persaingan usaha.</p>	
10	<p>Peran Pemerintah Daerah Dan Peran Pengrajin Tuban Dalam Mengembangkan Desa Wisata Batik Di Kabupaten Tuban Jawa</p>	<p>Peran Pemerintah Dan Peran Pengrajin</p>	<p>Riset Aksi (action research)</p>	<p>1) pemerintah daerah sangat aktif dalam mengembangkan desa wisata dengan melakukan pelatihan-pelatihan, peningkatan sumber daya manusia, pemenuhan saran</p>	<p>Dalam penelitian sebelumnya, untuk mengembangkan desa wisata baik didukung oleh peran pemerintah daerah dan peran pengrajin batik. Sedangkan pada</p>

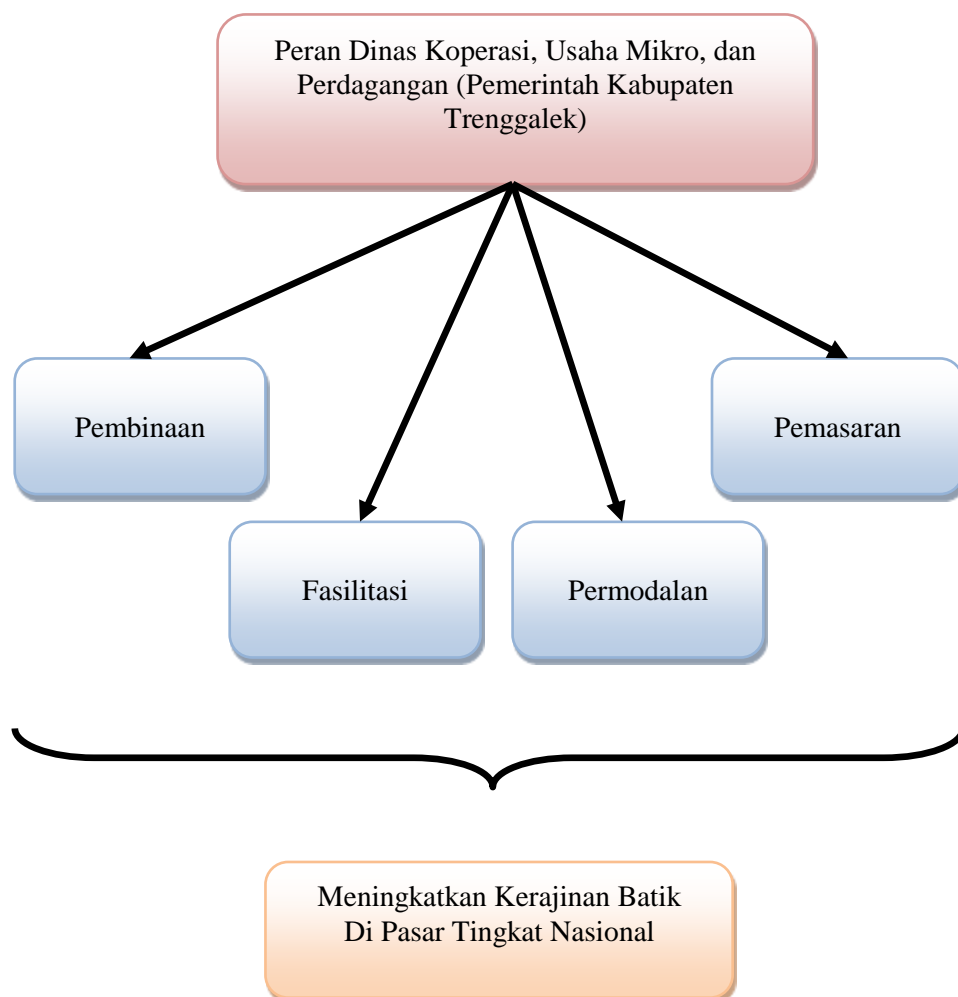
	Timur (Yuslinda Dwi Handini, 2020) ²⁷			dan prasarana, inovasi produk, motif dan meningkatkan pemasaran 2)pengrajin batik juga berperan aktif yaitu dengan meningkatkan produksi, pemasaran dan mengikuti pameran batik baik di dalam negeri maupun luar negeri	penelitian yang akan saya lakukan hanya terfokus pada peran pemerintah kabupaten Trenggalek melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.
--	--	--	--	--	--

²⁷Yuslinda Dwi Handini, *Peran Pemerintah Daerah Dan Peran Pengrajin Tuban Dalam Mengembangkan Desa Wisata Batik Di Kabupaten Tuban Jawa Timur*, (Tuban: Jurnal Tidak Diterbitkan, 2020)

E. Kerangka Konseptual

Untuk mendukung berjalannya penelitian agar tetap tertuju pada fokus penelitian maka dibuatlah sebuah kerangka konseptual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menghimpun data terkait Peran Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam Meningkatkan Kerajinan Batik Terang Galih di Pasar Tingkat Nasional (Studi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan). Gambar kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Penelitian ini akan diawali dengan menghimpun sumber data sekunder seperti jumlah pengusaha batik yang berada di Kabupaten Trenggalek serta peran nyata yang diberikan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam pembinaannya. Lalu terlaksanakan survei lapangan dengan memakai teknik wawancara mendalam. Selanjutnya data akan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif, sehingga diperoleh informasi tentang peran instansi pemerintah dalam upaya meningkatkan kerajinan batik Terang Galih di pasar tingkat nasional, faktor pendukung dan penghambat yang hadapi. Kemudian hasil dari penelitian dikaji lagi lebih mendalam. Sehingga melalui peran ini diharapkan dapat meningkatkan serta mengembangkan batik Terang Galih di pasar tingkat nasional.